

Analisis Gender dan Transformasi Sosial

Pembahas: Luh Anik Mayani

Pokok bahasan dalam buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* karya Mansour Fakih ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tentang analisis gender dan ketidakadilan, analisis gender dalam gerakan transformasi perempuan, dan agenda mendesak gerakan feminisme, termasuk tantangan dan strateginya pada masa mendatang.

Bagian 1. Analisis Gender dan Ketidakadilan

Analisis gender dan ketidakadilan dimulai dengan pembahasan tentang perbedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Untuk memahami konsep gender, kata *gender* harus dibedakan dengan kata *seks* (jenis kelamin). Jenis kelamin mengacu pada penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Manusia berjenis kelamin laki-laki memiliki penis, jakala, dan memproduksi sperma. Perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat pada manusia jenis laki-laki atau perempuan dan secara biologis tidak bisa dipertukarkan. Secara permanen, pembagian tersebut tidak bisa berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering disebut sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sementara itu, konsep *gender* mengacu pada sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi, baik secara sosial maupun secara kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, emosional, dan keibuan; laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Berbeda dengan jenis kelamin, ciri dan sifat gender dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang lemah lembut, emosional, dan keibuan; ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri gender dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain, atau dari suatu kelas ke kelas lain. Contohnya, di suku tertentu perempuan lebih kuat daripada laki-laki.

Selanjutnya, ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, misalnya, dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan (kodrat), seolah-olah bersifat biologis, yang tidak bisa diubah lagi. Padahal, sesungguhnya sifat-sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, bukan kodrat.

Karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak, mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah dianggap sebagai “kodrat” perempuan. Padahal, hal tersebut sebenarnya adalah konstruksi sosial dan kultural terhadap kaum perempuan.

Kenyataannya, urusan tersebut bukan kodrat karena dapat dilakukan atau dipertukarkan dengan kaum laki-laki.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Marginalisasi (pemiskinan) perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Contoh marginalisasi yang bersumber dari kebijakan pemerintah adalah penggantian penanaman jenis padi batang pendek dengan padi batang panjang. Tanpa disadari, penanaman jenis padi batang panjang menyingkirkan perempuan sebagai pemanen padi yang menggunakan ani-ani. Kehilangan pekerjaan dalam bidang pertanian berarti memiskinkan perempuan. Marginalisasi perempuan yang bersumber dari tradisi terlihat dari adanya suku yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan atau adanya agama/keyakinan yang memberikan perempuan setengah dari hak waris yang dapat diberikan kepada laki-laki.

Pandangan gender bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Bahwa perempuan irasional dan emosional menyebabkan perempuan tidak bisa tampil memimpin, menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, termasuk perempuan bisa pindah dengan alasan ikut suami, tetapi tidak sebaliknya.

Pelabelan negatif (stereotipe) terhadap perempuan menimbulkan asumsi bahwa perempuan bersolek untuk menarik lawan jenis sehingga pelecehan atau perkosaan terhadap kaum perempuan dianggap sebagai kesalahan perempuan. Contoh lain adalah stereotipe bahwa perempuan (istri) harus melayani laki-laki (suami).

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan karena bias gender disebut *gender-related violence*. Contohnya, perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan (pelayanan seksual tanpa kerelaan), kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi alat kelamin (sunat untuk perempuan), penciptaan ketergantungan, dan pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan melalui mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. Pemerintah/negara sering menerapkan standar ganda terhadap PSK: menangkapi/melarang praktik prostitusi, tetapi di sisi lain menarik pajak dari bisnis ini. PSK dianggap pekerjaan kotor, tetapi ramai pengunjung. Perempuan sering dipaksa untuk melakukan sterilisasi dalam rangka mengontrol jumlah penduduk. Memegang atau menyentuh bagian tubuh perempuan tanpa kerelaan si pemilik tubuh termasuk kekerasan terselubung. Contoh pelecehan seksual lainnya adalah lelucon jorok/vulgar, menyakiti seseorang dengan perkataan kotor, menginterogasi seseorang tentang kehidupan seksual atau kehidupan pribadinya, meminta imbalan seksual untuk promosi atau janji-janji lain, dan menyentuh atau menyenggol tubuh tanpa izin yang bersangkutan.

Beban kerja yang lebih banyak harus ditanggung perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Karena sosialisasi peran tersebut, perempuan merasa bersalah jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sebaliknya, laki-laki merasa itu bukan tanggung jawabnya, bahkan ada tradisi yang melarang laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan yang juga bekerja di luar rumah memikul beban kerja ganda. Selain itu, jenis pekerjaan domestik dianggap pekerjaan rendah dan tidak bernilai ekonomis. Pada keluarga-keluarga kaya, tanggung jawab pekerjaan domestik biasanya dipindahkan kepada pembantu rumah tangga. Pemindahan tanggung jawab tersebut berarti pemindahan marginalisasi, subordinasi, dan beban kerja dari istri kepada pembantu rumah tangga yang kebanyakan perempuan.

Jenis-jenis ketidakadilan gender tersebut telah terjadi di berbagai tingkatan: kebijakan, adat/kultur/agama, dan rumah tangga. Yang paling sulit diubah adalah ketidakadilan gender telah mengakar ke dalam keyakinan dan menjadi ideologi perempuan ataupun laki-laki. Semua bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi secara mantap sehingga laki-laki dan perempuan akhirnya terbiasa dan akhirnya memercayai bahwa peran gender tersebut seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur ketidakadilan gender yang diterima dan sudah tidak dapat lagi dirasakan sebagai sesuatu yang salah.

Bagian 2. Analisis Gender dalam Gerakan Transformasi Perempuan

Pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan pranata sosial yang ada, misalnya, institusi rumah tangga, perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat. Karena kesalahpahaman itu, feminisme tidak saja kurang mendapat tempat di kalangan kaum perempuan, tetapi juga secara umum ditolak oleh masyarakat.

Secara konseptual, feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas, dieksploitasi sehingga harus ada upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun ada beberapa aliran feminisme, pada hakikatnya mereka sepaham bahwa perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat, dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.

Secara sederhana, aliran feminisme dibagi menjadi dua aliran besar dalam ilmu sosial, yaitu aliran *status quo* atau fungsionalisme dan aliran konflik.

Aliran fungsionalisme struktural atau sering disebut aliran fungsionalisme adalah mazhab arus utama (*mainstream*) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Aliran ini berkeyakinan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan tiap-tiap bagian secara terus-menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Bagi penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner. Konflik dalam suatu masyarakat merupakan akibat dari tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Oleh karena itu, harmoni dan integrasi dipandang

fungsional, bernilai tinggi, dan harus ditegakkan, sedangkan konflik harus dihindarkan. Dengan demikian, *status quo* harus dipertahankan. Teori ini menolak setiap usaha yang mengguncang *status quo*, termasuk yang berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Jika perubahan harus terjadi, yang diperlukan adalah reformasi yang terkontrol, yang tidak mengganggu stabilitas sosial.

Pengaruh fungsionalisme ditemukan dalam pemikiran *feminisme liberal*. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu, tetapi pada saat yang sama mendiskriminasi kaum perempuan. Berbeda dengan feminisme radikal, feminisme liberal tidak mempertanyakan diskriminasi akibat ideologi patriarki dan juga tidak mempersoalkan analisis atas struktur kelas, politik, ekonomi, dan gender seperti yang dipermasalahkan oleh gerakan feminisme sosialis.

Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equity*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada kesempatan dan hak yang sama, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan. Jika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, tetapi kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan sendiri. Dengan dasar itu, usulan feminis liberal adalah mengatasi masalah kaum perempuan dengan cara menyiapkan kaum perempuan agar bisa bersaing dalam dunia yang penuh dengan persaingan bebas. Keterbelakangan perempuan dilihat sebagai akibat dari sikap irasional yang bersumber pada nilai tradisional dan juga karena perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Salah satu pengaruh feminisme liberal tereksresi dalam teori modernisasi dan program global yang dikenal dengan nama *Woman in Development*.

Aliran konflik berpendapat bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang merupakan pusat dari setiap hubungan sosial, termasuk hubungan kaum laki-laki dan perempuan. Setiap gagasan dan nilai selalu dipergunakan sebagai senjata untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perubahan akan terjadi melalui konflik yang akhirnya akan mengubah posisi dan hubungan. Perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan akan dilihat sebagai konflik antardua kepentingan.

Kelompok penganut aliran konflik, di antaranya, adalah feminisme radikal, feminisme marxis, dan feminisme sosialis. Feminisme radikal menganggap bahwa penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki berakar pada ideologi patriarki. Patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual, laki-laki memiliki kekuasaan yang superior dan keistimewaan dari segi ekonomi. Feminisme radikal menganggap bahwa revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan dapat dilakukan dalam bentuk yang sangat personal. *Personal is political* memberi peluang politik bagi kaum perempuan.

Selanjutnya, feminisme marxis berpandangan bahwa penindasan perempuan merupakan bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi (bagian dari kerangka pikir kapitalisme). Kaum perempuan dianggap bermanfaat bagi sistem kapitalisme karena upah buruh perempuan lebih murah dibandingkan dengan buruh laki-laki. Menurut marxis klasik, perubahan status perempuan dapat dilakukan melalui revolusi sosialis dan dengan menghapus pekerjaan rumah tangga (domestik). Dari perspektif ini, diyakini bahwa emansipasi perempuan terjadi jika perempuan berhenti mengurus rumah tangga.

Feminisme sosialis dianggap lebih memiliki harapan di masa depan karena secara umum analisis yang ditawarkan lebih dapat diterapkan oleh gerakan perempuan. Feminisme sosialis menganggap bahwa penindasan perempuan bisa melahirkan kesadaran revolusi, tetapi bukan revolusi model perempuan sebagai jenis kelamin (*woman as sex*) seperti yang diperjuangkan oleh feminis radikal. Bagi feminis sosialis, ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biologis atau perbedaan kegiatan produksi antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih karena konstruksi sosial terhadap perbedaan itu. Dengan dasar itu, feminis sosialis memerangi konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias gender.

Bagian 3. Agenda Mendesak

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat karena melibatkan manusia secara emosional, keyakinan, bahkan sampai pada urusan negara. Solusi tentang masalah gender dapat dilakukan melalui upaya jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis ketidakadilan gender; usaha jangka panjang untuk menemukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan.

Upaya jangka pendek dapat dilakukan melalui program-program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya, dalam mengatasi marginalisasi perempuan, perempuan harus dilibatkan dalam program pengembangan masyarakat. Untuk mengatasi masalah subordinasi, perempuan harus aktif mengikuti setiap jenjang pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok perempuan. Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan, dan berbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, perempuan sendiri harus mulai memberikan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan-tindakan tersebut berhenti. Membiarkan tindakan tersebut akan mendorong pelaku untuk melanggengkannya. Pelaku kekerasan seksual harus dilaporkan dan dihukum. Kampanye antikekerasan dan antipelecehan terhadap perempuan perlu dimasyarakatkan secara luas.

Upaya jangka panjang dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Upaya pendukungnya adalah melalui studi tentang berbagai ketidakadilan gender dan manifestasinya, baik di masyarakat, negara, maupun di dalam rumah tangga. Hasil kajian tersebut dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna mencapai perubahan kebijakan, hukum, dan aturan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap kaum perempuan.

Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang

Secara sederhana, gerakan feminisme di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga dasawarsa. Dasawarsa pertama (tahun 1970-an) merupakan tahapan “pelecehan“. Selama tahun 1975—1985 hampir semua aktivis LSM menganggap masalah gender bukan masalah penting, bahkan banyak yang melakukan pelecehan. Periode dasawarsa kedua (1985—1995) merupakan dasawarsa pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan analisis gender dan mengapa isu gender menjadi masalah pembangunan. Berbagai tantangan muncul dalam dasawarsa kedua, misalnya, tantangan dari pemikiran dan tafsiran keagamaan yang patriarki. Sehubungan dengan pemikiran dan tafsiran keagamaan tersebut diperlukan berbagai kajian terhadap ajaran-ajaran agama yang bias gender. Tantangan pada tahap dasawarsa ketiga adalah tantangan gerakan kilas balik dari aktivis, baik laki-laki maupun kaum perempuan. Artinya, masalah ketidakadilan gender telah mencapai puncak dinamikanya dan selanjutnya mulai dirasakan adanya persoalan yang ditimbulkan dan harus dihadapi. Salah satu reaksinya adalah masalah gender dianggap bukan masalah lagi sehingga nasibnya akan sama dengan analisis kelas, diabaikan dan dianggap tidak relevan.

Untuk menghindari perkembangan seperti itu, ada dua strategi yang diusulkan, yaitu (1) mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan dan (2) strategi advokasi. Strategi pertama memerlukan suatu tindakan yang mengarah pada terciptanya kebijakan manajemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif gender atau *gender policy*. Strategi advokasi memerlukan suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat. Perjuangannya melalui perubahan substansi hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam tafsiran agama dalam bentuk fikih ataupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi perempuan, yaitu suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antarsesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik, dan lebih adil. Gerakan transformasi gender lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem yang tidak adil. Transformasi gender adalah upaya liberasi dari segala bentuk penindasan, baik secara struktural, personal, kelas, warna kulit, maupun ekonomi internasional.

Gerakan feminis bukanlah gerakan yang semata-mata menyerang laki-laki, melainkan merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil, serta citra patriarkal bahwa perempuan itu pasif, bergantung (tidak mandiri), dan inferior. Tujuannya tidak sekadar memperbaiki status perempuan dengan menggunakan ukuran indikator norma laki-laki, tetapi untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan perubahan peran gender, baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki.

Sumber:

Fakih, Mansour. 2016. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.